

Efek *Job Relevant Information* dan Desentralisasi atas Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang)

Jasintha Dessy Tapatfeto^{1*}, Siti Mujanah², Abdul Halik³, Sulche Ifone Nafi⁴, dan Yunelci Martha Seliamang⁵

^{1,4,5} Politeknik Negeri Kupang, Indonesia

^{2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 01 November 25

Final Revision: 10 November 25

Accepted: 17 November 25

Online Publication: 31 December 25

KEYWORDS

Budgeting, Budget Participation, Job Relevant Information, Decentralization, Managerial Performance

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of budget participation on managerial performance, with job relevant information and decentralization serving as intervening variables at the Kupang District Health Office. This research employs a quantitative method with a descriptive-quantitative approach. Primary data were collected through questionnaires (Google Form) distributed to echelon II, III, IV, and V leaders at the Kupang District Health Office. Respondents were selected using a purposive sampling technique, consisting of leaders who have held their positions for at least one year and were directly involved in the budgeting process. The research instrument used a Likert scale, and the data analysis techniques included validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The findings indicate that budget participation, job relevant information, and decentralization have a positive effect on managerial performance at the Kupang District Health Office. Higher employee participation in the budgeting process, better quality of information used, and broader delegation of authority contribute to more optimal managerial performance.

KATA KUNCI

Anggaran, Partisipasi Penganggaran, *Job Relevant Information*, Desentralisasi, Kinerja Manajerial

CORRESPONDING AUTHOR

dessygmx2018@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v8i1.274

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial dengan *job relevant information* dan desentralisasi sebagai variabel *intervening* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner (Google Form) kepada pimpinan eselon II, III, IV, dan V di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sebagai responden. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pimpinan yang telah menduduki jabatan minimal satu tahun dan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert, dan teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, *job relevant information*, dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Semakin tinggi partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran, semakin baik kualitas informasi yang digunakan, serta semakin luas pelimpahan wewenang yang diberikan, maka semakin optimal pula kinerja manajerial yang dihasilkan.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, kewenangan pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah turut memberikan dasar hukum bagi penerapan otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan atas desentralisasi,

otonomi daerah diberikan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, nyata karena kewenangan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah, dan bertanggung jawab karena pelaksanaan otonomi harus selaras dengan tujuan nasional [1]. Dengan demikian, pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran publik harus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi dasar pertanggungjawaban publik [1]. Anggaran berperan penting dalam perencanaan serta pengendalian jangka pendek suatu organisasi, di mana anggaran berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan tolok ukur kinerja organisasi publik. Selain itu, anggaran juga menjadi instrumen pengendalian yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran menjadi komponen strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang (Dinkes) merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Instansi ini bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai program kesehatan, mulai dari upaya preventif, promotif, kuratif, hingga rehabilitatif, yang dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor dan koordinasi dengan lembaga kesehatan lainnya. Sebagai bagian dari sektor publik, Dinas Kesehatan diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang transparan, berkualitas, dan berkeadilan. Organisasi publik, termasuk dinas kesehatan, perlu memiliki pembagian tugas dan wewenang yang proporsional agar efektivitas kerja dapat tercapai [2]. Dengan demikian, peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan anggaran yang mendukung program kesehatan masyarakat.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran mencerminkan sejauh mana individu yang terlibat dalam proses tersebut memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap target anggaran. Pada akhir periode anggaran, hasil dari proses partisipatif ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi, yang dapat berujung pada pemberian penghargaan atas pencapaian target atau sanksi atas kegagalannya. Penganggaran merupakan proses sistematis di mana pimpinan satuan kerja menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya [3]. Dalam konteks organisasi pemerintah, keberhasilan penganggaran sangat bergantung pada partisipasi aktif dari setiap pimpinan dan pelaksana di berbagai tingkat organisasi. Masing-masing individu memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi anggaran mereka sendiri agar selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

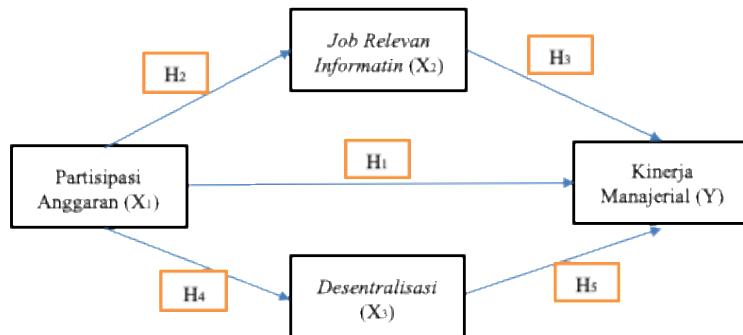
Partisipasi anggaran adalah proses di mana individu atau kelompok dalam organisasi terlibat aktif dalam penyusunan anggaran sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai [4]. Keterlibatan ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pencapaian target organisasi. Partisipasi dalam penyusunan anggaran menghasilkan *job relevant information* atau informasi yang relevan dengan pekerjaan, yang sangat penting bagi pengambilan keputusan manajerial [5]. Ketika manajer terlibat secara aktif dalam penyusunan anggaran, mereka lebih memahami kebutuhan operasional dan strategi organisasi, sehingga mampu memilih alternatif tindakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, partisipasi anggaran tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas keputusan, tetapi juga pada peningkatan kinerja manajerial secara keseluruhan.

Terdapat hubungan positif antara tingkat partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang yang bersifat desentralistik terhadap peningkatan kinerja manajerial [6]. Ketika struktur organisasi menerapkan desentralisasi, maka manajer memiliki lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Pemberian wewenang ini memperkuat motivasi serta akuntabilitas manajer untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, desentralisasi berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat efek positif dari partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian, sinergi antara partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang yang seimbang menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi publik [6].

Dalam literatur akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*), hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial telah banyak diteliti. Dalam penelitian tertentu, terdapat hubungan positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial [7], [8]. Namun, penelitian lain menemukan hasil yang berbeda, yaitu hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara kedua variabel tersebut [9], [10]. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontingensi (*contingency approach*), yang berasumsi bahwa hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu yang bersifat kondisional. Variabel tersebut dapat berperan sebagai variabel *intervening* yang memediasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Dalam konteks ini, *job relevant information* dan

desentralisasi digunakan sebagai variabel *intervening* untuk menjelaskan bagaimana partisipasi anggaran dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja manajerial. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memediasi efektivitas penganggaran dalam organisasi sektor publik seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

H2: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap *Job Relevant Information*.

H3: *Job Relevant Information* berpengaruh terhadap kinerja manajerial
H4: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap desentralisasi

H5: Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Dinkes Kabupaten Kupang memiliki wilayah kerja pada 24 Kecamatan dan 26 Puskesmas. Metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian survei. Metode survei merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap beberapa anggota sampel dari suatu populasi tertentu yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden melalui kuesioner (dikirim melalui Google Form) berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan [11]. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Partisipasi, *Job Relevant Information* dan Desentralisasi sedangkan variabel independennya adalah Kinerja Manajerial.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial [12]. Jenis data

deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang terlibat dalam penyusunan anggaran tahun 2025.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Karakteristik responden yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pimpinan OPD dan jajarannya yang memiliki tanggung jawab atas anggaran, pernah menduduki jabatan selama minimal satu tahun, memiliki hak pengambilan keputusan dalam unit organisasi berupa hak desentralisasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran memperoleh nilai rata-rata sebesar 23,69, yang mengindikasikan tingkat keterlibatan pegawai dan pejabat dalam proses penyusunan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang tergolong tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, menyusun rencana kegiatan, serta melakukan koordinasi selama proses perencanaan anggaran berlangsung. Dengan demikian, partisipasi yang tinggi mencerminkan adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antarbagian organisasi, yang berimplikasi positif terhadap efektivitas penyusunan anggaran dan pencapaian tujuan organisasi.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Anggaran	49	9,00	30,00	23,6939	4,52863
<i>Job Relevant Information</i>	49	6,00	30,00	23,7347	4,91925
Desentralisasi	49	7,00	35,00	26,7347	5,48777
Kinerja Manajerial	49	9,00	45,00	32,9184	7,34801
Valid N (listwise)	49				

Selanjutnya, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel *Job Relevant Information* (JRI) memiliki nilai rata-rata sebesar 23,73, yang juga termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang digunakan oleh para pegawai dan pejabat dalam melaksanakan tugas manajerial sudah cukup relevan, akurat, serta tepat waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi yang tersedia di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang telah mampu mendukung kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi secara efektif. Dengan tersedianya informasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, para manajer dapat membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan terarah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Pada variabel desentralisasi, hasil analisis memperlihatkan nilai rata-rata sebesar 26,73, yang menunjukkan tingkat pelaksanaan desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang tergolong sangat tinggi. Artinya, pegawai dan pejabat di berbagai jenjang organisasi telah memperoleh kewenangan yang cukup luas dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program kerja sesuai dengan fungsi dan kondisi wilayah kerja masing-masing. Tingginya tingkat desentralisasi ini mencerminkan adanya kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan unit-unit kerja untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan secara mandiri. Hal ini turut memperkuat efektivitas koordinasi vertikal maupun horizontal di dalam organisasi.

Sementara itu, hasil pengukuran terhadap kinerja manajerial menunjukkan nilai rata-rata sebesar 32,91, yang termasuk dalam kategori tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pejabat dan pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang telah mampu menjalankan fungsi-fungsi manajerial dengan baik, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan. Nilai rata-rata yang tinggi ini menggambarkan bahwa sistem manajerial dalam instansi tersebut telah berjalan secara efektif, yang didukung oleh penerapan desentralisasi yang optimal, partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran, serta pemanfaatan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara ketiga variabel tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.

Tabel 2 berikut ini menyajikan hasil uji F (ANOVA) yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Sedangkan Tabel 3 menampilkan hasil uji koefisien determinasi (R dan R Square) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai adjuster R square sebesar 52,7%, hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran, *job relevant information* dan desentralisasi berpengaruh 52,7% terhadap variabel kinerja keuangan sedangkan 38,3% dipengaruhi variabel lainnya.

Tabel 2. Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
<i>Regression</i>		1	1392,426	1392,426	54,571	
1	Residual	47	25,516			
Total		48	2591,673			

a. Dependent Variable: TOTAK YKM

b. Predictors: (Constant), TOTAL X1P

Tabel 3. Uji R

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,733 ^a	0,537	0,527	5,051

a. Predictors: (Constant), TOTAL X1P

b. Dependent Variable: TOTAK YKM

Tabel 4 menampilkan hasil uji t parsial yang digunakan *job relevant information*, dan desentralisasi terhadap untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen yaitu kinerja manajerial,

Tabel 4. Uji t Partisipasi Anggaran, Job Relevant Information dan Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i> B	<i>Std.Error</i>	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	t	Sig
<i>Constant</i>	4,739	3,882		1,221	0,228
Partisipasi Anggaran	1,189	1,161	0,733	7,387	0,000
<i>Job Relevant Information</i>	1,237	0,122	0,828	10,131	0,000
Desentralisasi	1,027	0,125	0,767	8,200	0,000

Tabel 5 berikut menyajikan hasil uji t antara variabel partisipasi anggaran terhadap *Job Relevant Information*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan tingkat informasi yang relevan dengan pekerjaan yang dimiliki oleh manajer.

Tabel 5. Uji t Partisipasi Anggaran terhadap *Job Relevant Information*

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i> B	<i>Std.Error</i>	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	t	Sig
<i>Constant</i>					
Partisipasi Anggaran	0,956	0,075	0,880	12,703	0,000

Tabel 6 menampilkan hasil uji t antara variabel partisipasi anggaran terhadap desentralisasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi anggaran berpengaruh terhadap tingkat desentralisasi dalam pengambilan keputusan manajerial di organisasi.

Tabel 6. Uji t Partisipasi Anggaran terhadap Desentralisasi

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i> B	<i>Std.Error</i>	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	t	Sig
<i>Constant</i>					
Partisipasi Anggaran	0,905	0,118	0,747	7,702	0,000

3.2. Pembahasan

Partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki makna keterlibatan aktif para pejabat atau manajer di berbagai tingkatan dalam proses perencanaan dan penetapan anggaran. Partisipasi ini mencakup keterlibatan kepala bidang, kepala seksi hingga staf pelaksana dalam menyusun rencana anggaran kegiatan dan kebutuhan program kesehatan daerah.

Hasil hipotesis 1 menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dengan nilai sig 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa ketika para manajer atau pejabat struktural di Dinas Kesehatan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian target anggaran tersebut. Dalam keterlibatan tersebut, para manajer juga akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sasaran strategis Dinas Kesehatan, misalnya seperti peningkatan layanan kesehatan. Dengan proses penyusunan anggaran yang partisipatif, maka akan mendorong interaksi lintas bidang sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya [6], [13].

Partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan aktif para manajer dan pejabat struktural dalam proses perencanaan, penentuan dan pengambilan keputusan terkait anggaran organisasi. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, partisipasi ini melibatkan kepala bidang, kepala seksi dan staf teknis dalam menyusun kebutuhan anggaran program kesehatan seperti

pelayanan kesehatan masyarakat pengendalian penyakit serta peningkatan mutu layanan. Hal ini menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan manajerial. Informasi akan dikatakan relevan jika membantu manajer memahami kondisi riil organisasi, menetapkan prioritas serta membuat keputusan yang efektif dalam mengelola sumber daya.

Hasil hipotesis 2 menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif *terhadap Job Relevant Information* diterima dengan nilai sig 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan keterlibatan dari berbagai pihak maka proses penyusunan anggaran menjadi sumber pertukaran informasi yang lebih luas. Dengan partisipasi aktif juga dapat meningkatkan akurasi dan keandalan misalnya terkait dengan data anggaran. Partisipasi juga dapat mendorong komunikasi dari bawah ke atas atau sebaliknya. Ketika berbagai pihak terlibat maka proses pemecahan masalah terkait anggaran akan lebih mudah menganalisis data dan mencari solusi bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya [10].

Job Relevant Information (JRI) merupakan informasi yang berhubungan langsung dengan tugas, tanggung jawab dan pengambilan keputusan manajer dalam organisasi [14]. Informasi ini meliputi data keuangan, operasional dan non keuangan yang relevan, akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan untuk membantu manajer mencapai tujuan kerja secara efektif. JRI pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang meliputi data kebutuhan obat dan alat kesehatan, informasi kinerja

puskesmas dan tenaga kesehatan, data penyakit, dana kesehatan masyarakat, anggaran dan realisasi program kesehatan serta laporan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Hasil hipotesis 3 menunjukkan bahwa *Job Relevant Information* berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial diterima dengan nilai sig 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa semakin relevan dan akurat informasi yang diterima maka semakin tepat keputusan yang diambil sehingga kinerja manajerial meningkat. Dengan adanya informasi yang relevan dan akurat maka semakin tepat keputusan yang diambil, sehingga kinerja manajerial meningkat. Informasi yang relevan akan membantu manajer merencanakan kegiatan dan memantau pelaksanaan program secara efektif. Dengan akses informasi yang relevan dan terkini maka manajer akan dapat merespons cepat dan tepat terhadap situasi darurat sehingga akan meningkatkan ketepatan tindakan dan tanggung jawab manajerial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya [15], [16].

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan dari tingkat pimpinan tertinggi kepada unit atau pejabat yang lebih rendah dalam struktur organisasi [17]. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, setiap unit kerja/puskesmas memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola program kesehatan sesuai kondisi daerahnya atau sesuai dengan kerangka kebijakan yang ditetapkan dinas.

Hasil hipotesis 4 menunjukkan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap Desentralisasi diterima dengan nilai sig 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa setiap partisipasi akan mendorong pembagian kewenangan. Misalnya ketika manajer/ unit kerja dilibatkan dalam penyusunan anggaran, pimpinan secara tidak langsung memberi ruang bagi desentralisasi keputusan. Agar proses penggunaan anggaran partisipasi belajar efektif, setiap unit harus memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi kebutuhannya sendiri. Proses anggaran yang partisipatif memungkinkan terjadinya dialog antara pimpinan dan unit pelaksana [18]. Ketika unit kerja menyusun anggaran, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasilnya.

Kinerja Manajerial merupakan kemampuan pejabat atau manajer dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan di dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Kinerja manajerial tercermin dari efektivitas pelaksanaan program kesehatan masyarakat, ketepatan penggunaan anggaran, kecepatan pengambilan keputusan, kualitas koordinasi antar bidang dan antar puskesmas, serta kemampuan mengatasi masalah di lapangan.

Hasil hipotesis 5 menunjukkan bahwa Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial diterima

dengan nilai sig 0,000, dimana desentralisasi akan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Ketika kewenangan tidak terpusat pada pimpinan saja maka keputusan dapat dibuat langsung oleh unit yang paling memahami situasi lapangan. Pembelian wewenang kepada manajer bidang atau kepala puskesmas akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil kerja. Manajer tingkat bawah pun akan memiliki informasi yang lebih relevan tentang kondisi masyarakat, sumber daya dan kebutuhan kesehatan di wilayahnya. Dengan adanya desentralisasi, maka hubungan antar bidang menjadi lebih bersifat koordinatif daripada instruktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian tertentu [10].

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, *Job Relevant Information* dan Desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Semakin tinggi partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran, semakin baik kualitas informasi yang digunakan dan semakin luas pelimpahan wewenang yang diberikan, maka semakin optimal pula kinerja manajerial yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pejabat atau pegawai dalam proses penyusunan anggaran, maka semakin baik pula kinerja manajerial yang ditunjukkan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran memberikan rasa memiliki terhadap tanggung jawab terhadap pencapaian hasil. Semakin baik kualitas dan relevansi informasi yang diterima manajer atau pegawai dalam pengambilan keputusan, maka semakin efektif pula kinerja manajerial mereka. Informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan akan mendukung proses perencanaan, pengendalian serta evaluasi di lingkungan Dinas Kesehatan. Semakin besar pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada unit kerja di tingkat bawah, maka semakin tinggi pula kinerja manajerial yang dicapai. Pemberian kewenangan kepada kepala bidang, seksi dan puskesmas untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Daftar Pustaka

- [1] Herminingsih, H. (2009). *Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- [2] Rison, R. (2017). Pengaruh komitmen organisasi, job relevant information dan locus of control terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1–15.
- [3] Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2016). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- [4] Falikhutun, F. (2017). Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budgetary Slack dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan dan Kohesivitas Kelompok. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 207-221. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i2.3557>

- [5] Gaspersz, V. (2001). *Total quality management*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Laily, A., & Satriawan, B. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Kepuasan Kerja Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Karimun). *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 12(3).
- [7] Alhasnawi, M. Y., Said, R. M., Daud, Z. M., & Muhammad, H. (2023). Enhancing managerial performance through budget participation: Insights from a two-stage PLS-SEM and artificial neural network (ANN) approach. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100161. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100161>
- [8] Arifin, S., & Rohman, A. (2012). *Pengaruh partisipasi penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah daerah: komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- [9] Apriansyah, G., Zirman, Z., & Rusli, R. (2014). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja, Job-Relevant Information Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perhotelan Di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Riau University).
- [10] Saraswati, D. (2019). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Pemoderasi (Survey pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 2(2), 30-37. <https://doi.org/10.35141/jraj.v2i2.517>
- [11] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariante dengan program IBM SPSS 26* (Edisi ke-10). Semarang: Universitas Diponegoro.
- [12] Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Edisi ke-2). Yogyakarta: Alfabeta.
- [13] Nazaruddin, I., & Setyawan, H. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi, desentralisasi, dan job relevant information sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 197–207.
- [14] Fitri, T. R. (2016). Pengaruh budgetary goal characteristics, kompensasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan motivasi sebagai variabel moderasi (Studi kasus pada dinas-dinas Kabupaten Rokan Hilir). *JOM Fekon*, 3(1), 520–534.
- [15] Mutia, A., Rinaldo, J., & Meyla, D. N. (2022). Pengaruh partisipasi anggaran dan job relevant information terhadap kinerja manajerial (Studi empiris RSUP M. Djamil Padang). *Pareso Jurnal*, 4(1), 113–128.
- [16] Indarto, S. L., & Ayu, S. D. (2012). Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial perusahaan melalui kecukupan anggaran, komitmen organisasi, komitmen tujuan anggaran, dan job relevant information (JRI). *Seri Kajian Ilmiah*, 14(1), 1–44.
- [17] Tapatfeto, J. D. (2014). Job Relevant Information Desentralisasi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 18(2), 219–241. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i2.148>
- [18] Wiratno, W. N., & Putri, N. K. (2016). Partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi, motivasi dan struktur desentralisasi sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 150–166. DOI: <https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.81>